



KPK Geledah Rumah Eks Menag

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah mantan Menteri Agama (Menag) Ya'qut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait pengurusan kuota haji.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggele-



Budi Prasetyo

dahan dilakukan untuk menindaklanjuti proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

"Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YCQ, tim mengamankan sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE)," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK,

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



KPK Geledah Rumah Eks Menag

Sambungan dari halaman 1

Jakarta, Jumat (15/8). Budi menambahkan, seluruh barang bukti yang diamankan akan diproses lebih lanjut. Menurutnya, barang bukti itu dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara kuota haji 2024.

"Dari barang bukti itu, penyidik akan dilakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk dan bukti untuk mendukung penanganan perkara ini," ucapnya. Budi menekankan, barang bukti elektronik yang disita beragam jenisnya. Salah satunya berupa telepon genggam yang diduga menyimpan data penting terkait perkara.

"Barang Bukti Elektronik itu macam-macam, salah satunya adalah handphone, nanti itu akan diekstraksi, dibuka isinya, kita akan lihat informasi-informasi yang dicari," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 pada 9 Agustus 2025. Pengumuman tersebut dilakukan setelah KPK meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus

tersebut. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa penghitungan awal kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1 triliun lebih. Seiring penanganan kasus, KPK telah mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, yaitu mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Upaya Penghilangan Barang Bukti

KPK menemukan indikasi adanya upaya penghilangan barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Indikasi tersebut muncul setelah penyidik KPK mengeledah kantor agensi perjalanan haji yang berlokasi di Jakarta pada Kamis (14/8).

"Penyidik menemukan petunjuk awal adanya dugaan penghilangan barang bukti," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (15/8). Ia menegaskan, tindakan tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum.

Menurutnya, KPK tidak segan menjerat pihak yang terlibat dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai obstruction of justice atau perintangian penyidikan.

"Penyidik tidak segan untuk mempertimbangkan penge-naan Pasal 21 terhadap pihak swasta yang berupaya merintang, menghalangi, salah satunya termasuk menghilangkan barang bukti dalam perkara haji ini," tegasnya.

Korupsi Kuota Haji Cederai Umat Islam

Terpisah, Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Islam (PW Persis) Jakarta Sofyan Munawar mengatakan, Persis Jakarta mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas para pelaku manipulasi kuota haji. Sofyan menegaskan tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang merampas hak umat. Terlebih kasus ini masuk dalam perkara ibadah yang sangat penting bagi umat Islam.

"Umumkan hasil penyelidikan secara terbuka kepada publik, hukumlah mereka seadil-adilnya, dan pastikan hak umat dikembalikan," ujar Sofyan, Jumat (15/8). Ia mengingatkan bahwa haji adalah panggilan suci. Haji menjadi sebuah perjalanan suci yang didambakan setiap muslim sepanjang hidupnya. "Setiap kursi dalam kuota haji bukan sekadar angka, tetapi amanah besar, impian panjang, dan doa yang dipanjatkan bertahun-tahun lamanya," katanya.

Menurut Sofyan, perbuatan korupsi dan penyalahgunaan kuota haji merupakan luka yang menoreh hati umat. Karena menyentuh urusan ibadah yang paling mulia. Dia menerangkan, kuota haji adalah hak umat yang harus disampaikan kepada yang berhak sesuai aturan.

Bagi dia, mempermainkan kuota haji, baik dengan memperjualbelikan, memberikan kepada yang tidak berhak, atau menghalangi yang berhak adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah dan amanah

umat. Sehingga korupsi pada program haji termasuk kejahatan moral dan agama.

"Karena merampas hak orang yang telah bersusah payah mempersiapkan ibadahnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Sofyan menyebut mempermainkan kuota haji sebagai bentuk kezaliman. Karena merampas hak umat yang seharusnya dapat menunaikan ibadah haji.

"Kezaliman ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt," ujarnya.

PW Persis Jakarta juga mendesak Kementerian Agama untuk menjelaskan secara terbuka proses distribusi kuota haji 2023-2024 serta menjamin tidak ada pihak yang diistimewakan dengan imbalan atau koneksi. Dia menegaskan, amanah ini harus dikelola dengan sistem yang bersih, terbuka, dan diawasi bersama.

Sofyan juga mengajak seluruh umat Islam dan para penyelenggara bimbingan haji untuk tidak ikut dalam praktik jual beli kuota haji. Serta berani menolak segala bentuk pungutan liar atau gratifikasi terkait haji, dan melapor jika melihat penyimpangan.

"Kita berharap negeri ini memiliki pemimpin yang takut kepada Allah, mencintai keadilan, mampu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya serta dibersihkan dari para pengkhianat amanah dan orang-orang zalim," pungkasnya. (jp/ant)